



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Laporan ALCO Regional

s.d 30 Juni 2022

Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Utara





Ringkasan Eksekutif



Realisasi APBN Regional

s.d. 30 Juni 2022 total pendapatan **Rp21,93 T** dan total belanja **Rp27,42 T** sehingga menghasilkan **Defisit regional sebesar Rp5,49 T**



Deviasi realisasi Penerimaan atas proyeksi

Total deviasi sisi Pendapatan sebesar **Rp1,18 T** dari pagu, disumbang oleh:
DJP (pajak) : **Rp0,51 T (11,37%)**
DJCB (bea cukai) : **Rp0,57 T (146,43%)**
PNBP/Hibah : **Rp0,027 T (64,43%)**



Deviasi realisasi Pengeluaran atas proyeksi

Total deviasi sisi Belanja sebesar **Rp2,29 T** disumbang oleh:
Belanja K/L: **Rp1,06 T (49%)**
TKDD: **Rp1,23 T (37%)**



Realisasi I-Account APBD

s.d. 30 Juni 2022 mencapai Pendapatan **Rp13,29 T**, Belanja **Rp10,92 T** dan Pembiayaan Daerah **Rp0,089 T** dan akumulasi SiLPA **Rp2,47 T**



Kontribusi TKDD pada APBD

Realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD s.d 30 Juni 2022 sebesar **Rp9,14 T (23,32% dari pagu)** dengan kontribusi sebesar **68,73 %** dari total Realisasi APBD



Perkembangan Ekonomi Regional

PDRB Regional pada tw I 2022 **tumbuh sebesar 3,9%** dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.
Juni 2022, Inflasi Sumatera Utara **sebesar 1,40 % (m-to-m)**.
Bea Keluar tumbuh didorong kinerja dari pertumbuhan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya sejak akhir 2020.



Strategic Issues

Pembangunan Bandara di Mandailing Natal, Pembangunan Jalan akses KSPN Danau Toba dan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan dapat mempercepat laju perekonomian di Sumut



Policy Response

Terhadap kebijakan peningkatan tarif perpajakan, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif serta assessment dampak kenaikan Tarif perpajakan tersebut terhadap tingkat konsumsi masyarakat



STRATEGIC DASHBOARD ALCo REGIONAL s.d 30 Juni 2022

COVID UNCERTAINTY

Dinamika Covid terus berlanjut namun lebih terkendali

Covid Updates :

PPKM Level 1 Berlanjut, Situasi Membaik



- Kasus Covid-19 di Prov. Sumatra Utara terus membaik akibat kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah
- Jumlah vaksinasi dosis 1 : 11,00 juta
- Jumlah vaksinasi dosis 2 : 9,41 juta
- Jumlah vaksinasi dosis 3 : 2,83 juta

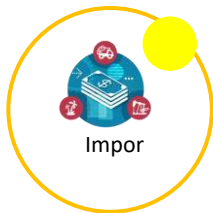
Neraca Perdagangan:

Kinerja Neraca perdagangan pada regional Sumatra Utara semakin baik (m-to-m)



Ekspor

Ekspor ↑



Impor

Impor ↓

Inflow kembali meningkat meski tetap volatile

Fiskal : Percepatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah didukung

perbaikan kinerja pajak dan posisi kas yang likuid menjadi stimulus akselerasi PDB hingga Juni 2022



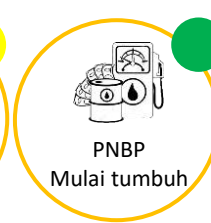
-TAX-
Pajak Daman Negeri Tumbuh

PPh 21, Impor, Badan
PPN ↑



Bea Cukai
Ditopang BK

BK ↑
BM ↑
Cukai ↓



PNBP
Mulai tumbuh

PNBP Lainnya ↑



Belanja Pemerintah
Pusat Tumbuh

Barang ↓
Modal ↓
Pegawai ↓



Penyerapan
dana TKDD
tumbuh

DAU ↑
DBH ↓

Sektor Riil : Pemulihan konsumsi RT dan aktivitas korporasi membaik seiring dengan terkendalinya Covid-19.



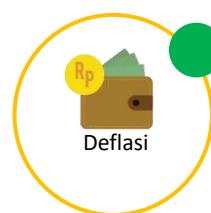
Konsumsi
RT membaik

- Mobilitas mulai pulih
- IKK dan Indeks penjualan ritel membaik



Investasi PMTB

- Impor barang modal menurun
- Investasi tertahan PPKM



Deflasi

- Inflasi Juni naik ke 1,40%
- Inflasi volatile food inflasi 2,51%

Risiko-Risiko

1. Risiko Pandemi Covid dan program vaksinasi
 - Peningkatan tren kasus Covid 19
 - Adanya varian baru
 - Kecepatan vaksinasi
2. Risiko Penerimaan Perpajakan
3. Risiko Realisasi Percepatan Belanja
4. Risiko lainnya.

Rekomendasi ALCo Regional

● Normal

● Perlu Perhatian

● Perlu Perhatian Lebih Lanjut

● Perlu Penanganan Khusus



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

APBN





Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 30 Juni 2022

(miliar rupiah)

URAIAN	2021			2022			Growth (%)
	Pagu	realisasi s.d. Juni	% Real	Pagu	Realisasi s.d. Juni	% Real	
A. Pendapatan dan Hibah	28.653,74	10.831,70	37,80%	27.616,60	21.927,88	79,38%	102,38%
I. Penerimaan Dalam Negeri	26.987,84	9.995,12	37,04%	25.733,31	20.927,35	81,30%	109,31%
1. Penerimaan Perpajakan	25.219,45	7.568,75	30,01%	23.610,22	17.846,87	73,57%	129,49%
2. Kepabeanan & Cukai	1.768,39	2.426,37	137,21%	2.123,09	3.550,66	167,24%	46,34%
II. PNBP	1.665,89	836,58	50,22%	1.883,29	1.000,53	53,13%	19,60%
B. Belanja Negara	62.872,54	28.884,02	45,94%	59.951,85	27.415,33	45,73%	-5,08%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.074,06	8.539,42	40,52%	20.105,10	7.801,45	38,81%	-8,64%
1. Belanja K/L	21.074,06	8.539,42	40,520%	20.105,10	7.801,45	38,81%	-8,64%
2. Belanja Non K/L	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	41.798,48	20.344,61	48,67%	39.846,75	19.613,88	49,22%	-3,59%
A. Transfer ke Daerah	37.273,19	19.041,48	51,09%	35.449,96	17.828,14	50,29%	-6,37%
B. Dana Desa	4.525,29	1.303,13	28,80%	4.396,78	1.785,74	40,61%	37,03%
C. Keseimbangan Primer	0	0	0	0	0	0	0
D. Surplus/Defisit Anggaran	-34.218,80	-18.052,32	52,76%	-32.335,25	-5.494,27	16,99%	-69,56%
E. Pembiayaan Anggaran	0	0	0	0	0	0	0
SiLPA/(SiKPA)	-34.218,80	-18.052,32	52,76%	32.335,25	-5.494,27	16,99%	-69,56%

Kinerja APBN s.d. Juni 2022 (YoY)

Pendapatan APBN di Sumatera Utara mengalami

- **pertumbuhan** sebesar Rp11,09 Triliun atau naik sebesar 102,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
- Kenaikan tersebut paling besar disumbang oleh PPh non migas yang naik sebesar Rp8,78 T (167,17%)

Kinerja Belanja APBN s.d. Juni 2022 (YoY)

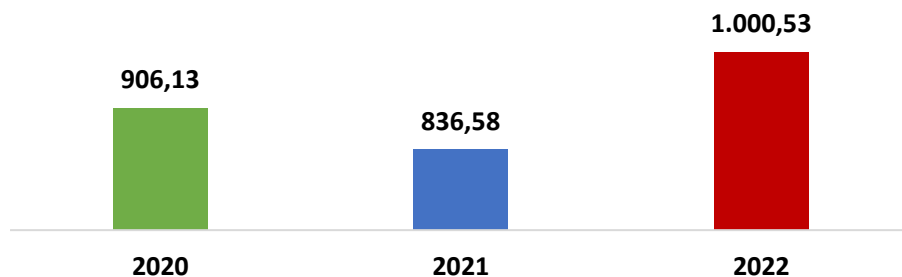
- Belanja K/L mengalami kontraksi sebesar Rp0,74 T turun 8,64% dibanding tahun sebelumnya, dikarenakan terjadi penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,32 T atau turun 21,60% dibanding tahun sebelumnya
- TKDD turun 3,59% atau sebesar Rp0,73 T, yang disebabkan realisasi DBH yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 76,05% atau sebesar Rp0,71 T dibanding tahun sebelumnya, serta DAK Non-Fisik yang terkontraksi sebesar 9,55% atau turun sebesar Rp0,45T

Sumber : aplikasi OM-SPAN, aplikasi SIMTRADA, Kanwil DJP Sumut dan Kanwil DJBC Sumut (diolah)



KINERJA PNBP s.d 30 Juni 2022

Realisasi PNBP s.d Juni 2022 Rp1.000,53 miliar



5 jenis pendapatan PNBP tertinggi per Juni 2022

No	Akun	Pendapatan
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	208,73
2	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	108,44
3	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	82,89
4	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	69,68
5	Pendapatan Biaya Pendidikan	54,76

Realisasi PNBP sampai dengan Juni 2022 telah terealisasi 53,13% dari target. Realisasi tersebut naik 19,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan PNBP per K/L



KEPOLISIAN

Rp232,52 M



MENHAN

Rp184,48M



MENDIKNAS

Rp139,61M



MENAG

Rp115,31



MENKES

Rp89,80 M

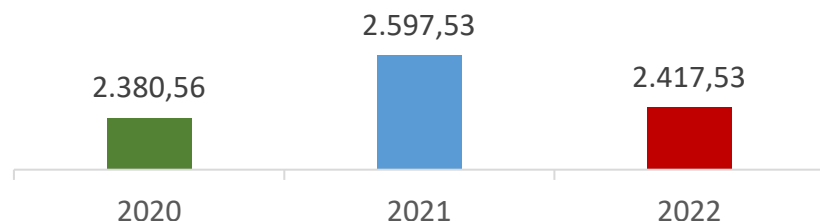
Sumber : aplikasi OM-SPAN



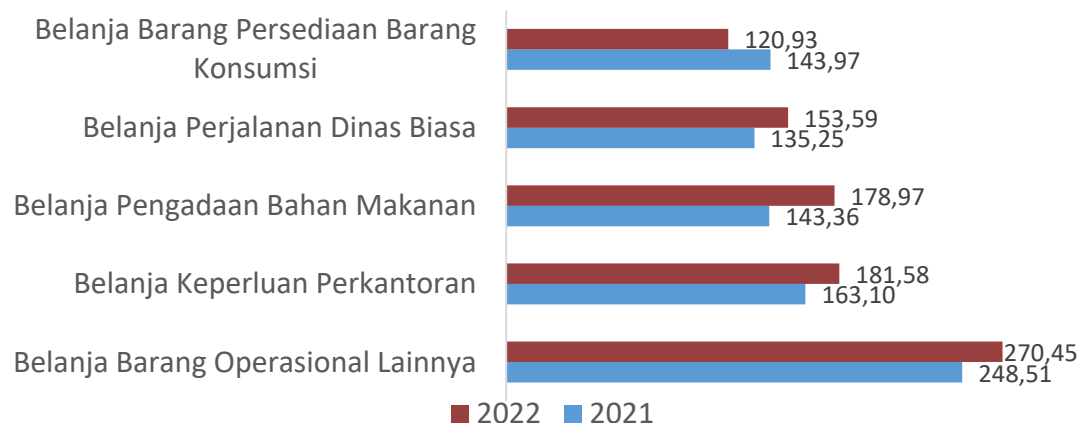


CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 30 Juni 2022

Realisasi Belanja Barang s.d Juni 2022 Rp2.417,53 miliar



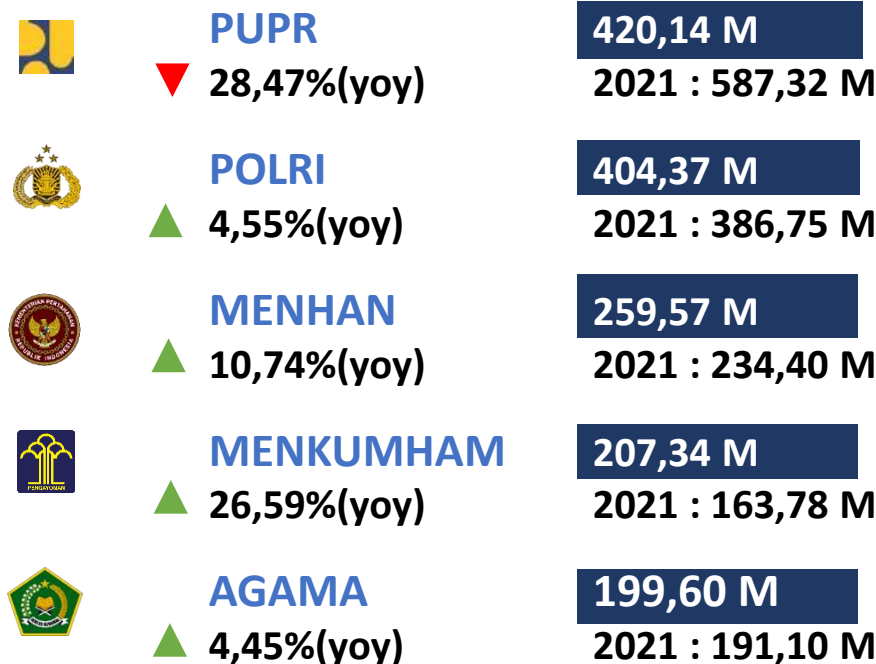
Realisasi Belanja Barang Terbesar per Akun



Realisasi belanja barang s.d Juni tahun 2022 mengalami kontraksi 6,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Barang didominasi oleh Belanja Operasional Lainnya sebesar Rp270,45 miliar (meningkat 8,83% dibandingkan tahun sebelumnya)

Sumber : aplikasi OM-SPAN

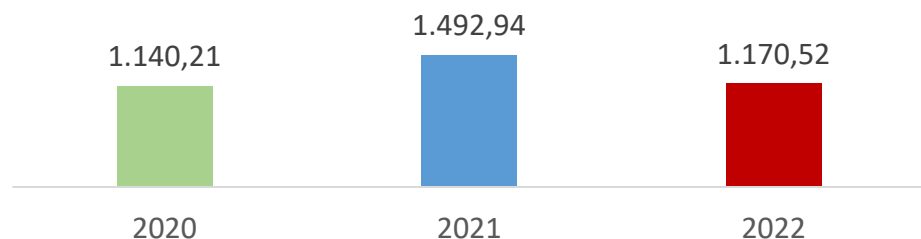
Kinerja Belanja Barang K/L



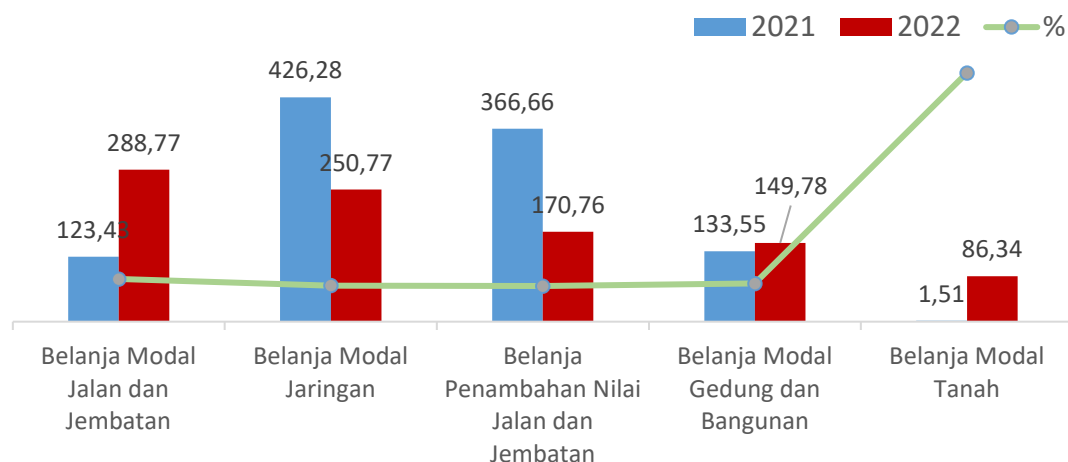


CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 30 Juni 2022

Realisasi Belanja Modal Rp1.170,52 miliar



Realisasi Belanja modal Terbesar per Akun



Realisasi belanja modal Juni tahun 2022 turun 21,60%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal tanah sebesar Rp84,83 miliar (5.616,69%), disusul Belanja Modal Jalan dan Jembatan tumbuh 133,95%.

Kinerja Belanja Modal K/L



MENHUB
▲ 239,93%(yoy)

Rp478,47 M

2021 : Rp140,75 M



PUPR
▼ -56,76%(yoy)

Rp477,74 M

2021 : Rp1104,93 M



MENHAN
▲ 28,08%(yoy)

Rp82,00 M

2021 : Rp64,03 M



MENAG
▲ 35,21%(yoy)

Rp35,29M

2021 : Rp26,10M

KEMENPAR
▼ -47,13%(yoy)

Rp31,67 M

2021 : Rp59,89 M

Belanja Modal Kementerian PUPR

- Turunnya pagu cukup signifikan sebesar 44,17% dari tahun 2021 (1,4 triliun) dan terdapat satker yang belum memperoleh DIPA tahun 2022 (Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sumatera Utara)
- Sebagian belanja modal masih dalam proses lelang dan penandatanganan kontrak. Keterlambatan tersebut antara lain disebabkan adanya perubahan desain pekerjaan konstruksi, pelaksanaan lelang dilaksanakan secara terpusat.
- Pihak ke-3 belum mengajukan tagihan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sumber : aplikasi OM-SPAN



CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 30 Juni 2022

Realisasi TKDD s.d 30 Juni 2022

1. Belanja yang bersumber dari TKDD telah terealisasi sebesar 49,22% atau senilai 19,61 triliun dari pagu sebesar Rp39,85 triliun, terkontraksi 3,59% (yoy).
2. Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp0,19 triliun (6,14%), tumbuh 1,59% (yoy).
3. Penyaluran Dana Desa sebesar Rp1,79 triliun (40,61%), tumbuh 37,03% (yoy)



Sumber : aplikasi OM-SPAN dan SIMTRADA (diolah)



Rincian Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 30 Juni 2022

(miliar rupiah)

URAIAN	2021			2022			%growth
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
A. Pendapatan dan Hibah	28.653,74	10.831,70	37,80	27.616,60	21.921,06	79,38	102,38%
I. Penerimaan Dalam Negeri	28.653,74	10.831,70	37,80	27.616,60	21.921,06	79,38	102,38%
1. Penerimaan Perpajakan	26.987,84	9.995,12	37,04	25.733,31	20.920,53	81,30	109,31%
a. Pajak Dalam Negeri	26.177,18	8.053,73	30,77	24.410,77	17.839,87	73,08	121,51%
i. Pajak Penghasilan	13.263,57	5.250,07	39,58	12.104,79	14.026,58	115,88	167,17%
- Migas	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,20%
- Non Migas	13.263,57	5.250,00	39,58	12.104,79	14.026,58	115,88	167,17%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	11.055,95	2.077,56	18,79	10.461,70	3.178,00	30,38	52,97%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	520,99	76,81	14,74	729,31	31,22	4,28	-59,35%
v. Cukai	957,73	484,99	50,64	800,55	470,00	58,71	-3,09%
vi. Pajak Lainnya	378,94	164,31	43,36	314,43	134,07	42,64	-18,41%
b. Pajak Perdagangan Internasional	810,67	1.941,39	239,48	1.322,54	3.080,66	232,94	58,68%
i. Bea Masuk	747,54	454,31	60,77	783,05	490,34	62,62	7,93%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	63,13	1.487,08	2355,60	539,48	2.590,33	480,15	74,19%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.665,89	836,58	50,22	1.883,29	1.000,53	53,13	19,60%
c. PNPB Lainnya	635,54	461,19	72,57	800,11	641,32	80,15	39,06%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	1.030,35	375,38	36,43	1.083,19	359,21	33,16	-4,31%
B. Belanja Negara	31.968,61	28.884,02	90,35	59.948,85	27.415,33	45,73	-5,08%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.074,06	8.539,42	40,52	20.102,10	7.801,45	38,81	-8,64%
1. Belanja Pegawai	8.982,86	4.441,54	49,44	9.174,04	4.197,64	45,76	-5,49%
2. Belanja Barang	7.283,23	2.597,53	35,66	7.024,93	2.417,53	34,41	-6,93%
3. Belanja Modal	4.769,34	1.492,94	31,30	3.856,27	1.170,52	30,35	-21,60%
7. Bantuan Sosial	38,64	7,40	19,16	46,87	15,76	33,62	112,87%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	41.798,48	20.344,61	48,67	39.846,75	19.613,88	49,22	-3,59%
A. Transfer ke Daerah	37.273,19	19.041,48	51,09	35.449,96	17.828,14	50,29	-6,37%
a. Dana Perimbangan	36.826,64	18.818,21	51,10	35.318,46	17.762,38	50,29	-5,61%
i. Dana Transfer Umum	25.901,28	13.901,98	53,67	24.566,37	13.295,09	54,12	-4,37%
- Dana Bagi Hasil	3.213,85	940,06	29,25	1.874,44	225,19	12,01	-76,05%
- Dana Alokasi Umum	22.687,43	12.961,92	57,13	22.691,93	13.069,90	57,60	0,83%
ii. Dana Transfer Khusus	10.925,36	4.916,23	45,00	10.752,09	4.467,30	41,55	-9,13%
- Dana Alokasi Khusus Fisik	2.975,40	185,01	6,22	3.059,24	187,95	6,14	1,59%
- Dana Alokasi Khusus NonFisik	7.949,96	4.731,22	59,51	7.692,85	4.279,34	55,63	-9,55%
b. Dana Insentif Daerah	446,54	223,27	50,00	131,51	65,75	50,00	-70,55%
c. Dana Otsus dan Keistimewaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0
B. Dana Desa	4.525,29	1.303,13	28,80	4.396,78	1.785,74	40,61	37,03%
C. Keseimbangan Primer			0,00	0,00	0,00	0,00	0
D. Surplus/Defisit Anggaran	-3.314,87	-18.052,32	544,59	-32.332,25	-5.494,27	16,99	-69,56%
E. Pembiayaan				0,00	0,01	0,00	0,00%
V. Pembiayaan Lainnya				0,00	0,01	0,00	0,00%

Sumber : aplikasi OM-SPAN, aplikasi SIMTRADA, Kanwil DJP Sumut dan Kanwil DJBC Sumut (diolah)





PROYEKSI DAN CAPAIAN PENERIMAAN

Proyeksi Penerimaan pada bulan Juni *understated* sebesar **Rp 1,18 triliun** [realisasi Pajak lebih tinggi Rp 509 miliar, realisasi Bea Cukai lebih tinggi Rp 572 miliar, dan realisasi PNPB dan Hibah lebih tinggi Rp 27 miliar]. Pada bulan Juli 2022, penerimaan pajak diproyeksikan Rp 4,03 triliun, Bea Cukai Rp 711 miliar dan PNPB/Hibah Rp 226 triliun.

*Dalam ribuan rupiah

No	Bulan	Pajak				Bea Cukai				PNBP dan Hibah				
		Real 2,021	Proy 2,022	Real 2,022	Dev	Real 2,021	Proy 2,022	Real 2,022	Dev	Real 2,020	Real 2,021	Proy 2,022	Real 2,022	Dev
1	Januari	880,431,647	2,048,360,000	2,229,520,000	8.8%	243,758,599	181,080,582	533,435,765	194.6%	111,166,655	66,172,490	360,650,306	118,687,534	-67.1%
2	Februari	1,202,299,106	1,545,150,000	1,483,373,706	-4.0%	249,624,119	392,451,262	445,892,888	13.6%	109,854,051	68,084,397	322,796,149	72,290,523	-77.6%
3	Maret	1,216,868,308	1,662,938,760	1,542,829,098	-7.2%	438,804,336	553,674,391	651,608,377	17.7%	197,292,032	250,340,293	91,716,292	254,767,712	177.8%
4	April	2,204,997,472	2,325,335,483	9,393,128,601	303.9%	584,379,170	742,283,307	639,325,774	-13.9%	203,019,718	116,135,119	170,249,544	202,375,163	18.9%
5	Mei	1,456,680,031	4,840,095,100	2,987,635,465	-38.3%	462,599,682	658,157,900	317,710,877	-51.7%	76,797,801	117,926,862	228,819,907	106,535,584	-53.4%
6	Juni	1,107,214,209	4,485,941,800	4,995,921,258	11.4%	447,208,320	390,648,560	962,688,645	146.4%	207,996,415	217,917,826	149,533,338	245,874,163	64.4%
7	Juli	947,807,843	4,037,347,620			523,680,903	711,235,150			87,628,227	168,945,836	182,490,938		
8	Agustus	1,380,956,483				414,281,256				118,707,252	133,185,345			
9	September	1,540,840,657				605,099,860				195,609,769	229,048,198			
10	Oktober	1,471,215,218				578,467,548				211,777,254	175,350,096			
11	November	2,388,141,832				613,132,956				132,724,506	205,537,069			
12	Desember	1,890,887,171				761,723,876				184,748,768	411,134,303			
TOTAL		17,688,339,977	20,945,168,763	22,632,408,128		5,922,760,625	3,629,531,152	3,550,662,326		1,837,322,448	2,159,777,834	1,506,256,474		

PENYEBAB
DEVIASI
JUN



Deviasi Pajak bulan Juni 2022 sebesar Rp 509 miliar disebabkan oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berdampak positif pada penerimaan pajak

Deviasi Bea Cukai bulan Juni 2022 sebesar Rp 572 miliar disebabkan oleh meningkatnya aktivitas impor dan pemberlakuan baru bea keluar produk CPO dan turunannya dan program percepatan ekspor

Deviasi PNPB dan Hibah bulan Juni 2022 sebesar Rp 27 miliar disebabkan oleh penerimaan SDA migas yang meningkat

Notes: Understated proyeksi= realisasi > proyeksi ; Overstated proyeksi = realisasi < proyeksi

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)





PROYEKSI DAN CAPAIAN PENGELUARAN

Proyeksi Belanja pada bulan Juni 2022 *understated* sebesar **Rp 2,29 triliun** [realisasi Belanja K/L lebih tinggi Rp 1,06 triliun dan realisasi TKDD lebih tinggi/rendah Rp 1,23 triliun. Pada bulan Juli 2022, Belanja K/L diproyeksikan Rp 4,10 triliun dan TKDD Cukai Rp 3,29 triliun.

**Dalam ribuan rupiah*

No	Bulan	Belanja K/L				TKDD				
		Real 2,021	Proy 2,022	Real 2,022	Dev	Real 2,020	Real 2,021	Proy 2,022	Real 2,022	Dev
1	Januari	554,217,394	1,112,782,289	549,624,469	-51%	3,007,282,192	2,625,700,584	3,283,371,988	2,934,942,313	-11%
2	Februari	1,297,934,878	2,347,834,674	1,330,087,742	-43%	2,443,349,619	2,755,433,996	3,032,337,479	2,250,508,641	-26%
3	Maret	2,581,572,364	1,986,579,059	2,056,447,011	4%	4,043,099,797	3,656,191,878	2,542,222,486	3,010,914,279	18%
4	April	2,206,691,530	3,350,852,087	2,686,078,569	-20%	3,135,747,612	2,999,178,301	2,868,965,814	3,445,713,916	20%
5	Mei	3,528,973,531	2,177,170,547	1,559,306,875	-28%	2,638,450,996	4,322,137,095	3,239,540,565	2,393,723,407	-26%
6	Juni	2,420,519,847	2,178,733,871	3,241,797,257	49%	5,259,326,341	3,999,156,675	3,339,157,434	4,573,577,464	37%
7	Juli	2,191,053,003	4,101,043,524			3,579,338,762	1,712,264,530	3,291,341,337		
8	Agustus	2,294,996,830				3,885,114,633	3,173,930,167			
9	September	2,580,610,931				4,205,773,899	3,618,233,211			
10	Oktober	4,062,780,763				3,519,111,424	5,490,375,662			
11	November	3,052,910,887				2,917,766,757	3,602,786,987			
12	Desember	4,736,300,686				1,009,264,185	3,326,757,292			
TOTAL		31,508,562,644	17,254,996,051	11,423,341,923		39,643,626,217	41,282,146,378	21,596,937,103	18,609,380,020	

PENYEBAB
DEVIASI
JUN



Deviasi Belanja K/L bulan Juni 2022 sebesar Rp 1,06 triliun disebabkan oleh kebijakan pemulihan ekonomi, subsidi energi, dan kenaikan harga komoditas

Deviasi TKDD bulan Juni 2022 sebesar Rp 1,23 triliun disebabkan oleh pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)

Paparan ALCO Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Juni 2022





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

APBD DAN KINERJA TKDD





Kinerja APBD Regional Provinsi Sumatera Utara Periode s.d Juni 2022

(miliar rupiah)

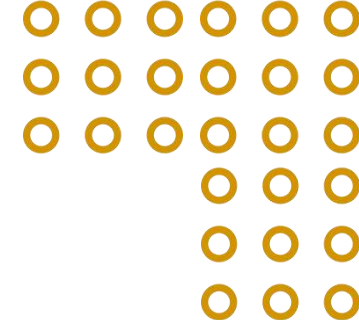
AKUN	PAGU	REALISASI	%
Pendapatan Daerah	57.225,41	13.291,87	23,23%
PAD	14.636,05	3.686,42	25,19%
Pajak Daerah	11.337,70	3.197,96	28,21%
Retribusi Daerah	752,87	60,16	7,99%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	708,09	192,05	27,12%
Lain-Lain PAD yang Sah	1.837,39	236,24	12,86%
TKDD	39.183,14	9.135,67	23,32%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	39.183,14	9.135,67	23,32%
Pendapatan Lainnya	3.406,22	469,79	13,79%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.572,55	438,11	17,03%
Pendapatan Hibah	166,62	27,59	16,56%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	667,05	4,09	0,61%
Belanja Daerah	59.502,33	10.915,24	18,34%
Belanja Pegawai	21.766,31	5.416,55	24,89%
Belanja Barang Jasa	14.936,26	2.185,68	14,63%
Belanja Modal	9.303,59	632,1	6,79%
Belanja Lainnya	13.496,18	2.680,91	19,86%
Belanja Bunga	44,29	5,65	12,76%
Belanja Subsidi	2,69	0,34	12,64%
Belanja Hibah	3.117,25	369,26	11,85%
Belanja Bantuan Sosial	253,6	14,16	5,58%
Belanja Tidak Terduga	655,63	41,8	6,38%
Belanja Bagi Hasil	2.745,72	1.583,89	57,69%
Belanja Bantuan Keuangan	6.676,99	665,81	9,97%
Surplus/(Defisit)	-2.276,92	2.376,63	-104,38%
Pembiayaan Daerah	2.365,24	88,73	3,75%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	2.697,30	262,27	9,72%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.126,03	195,91	9,21%
Penerimaan Pinjaman Daerah	556,07	66,32	11,93%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	15,2	0,05	0,33%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	#DIV/0!
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	332,06	173,54	52,26%
Penyertaan Modal Daerah	224,19	141,49	63,11%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	101,52	32,05	31,57%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,35	0	0,00%
SILPA/SIKPA	88,32	2.465,36	2791,39%

(miliar rupiah)

JENIS TKDD	PAGU	REALISASI	%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	1.874,44	225,19	12,01
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	22.691,93	13.069,90	57,60
3. DAK Fisik	3.059,24	187,95	6,14
4. DAK Non Fisik	7.692,85	65,75	50,00
5. DID	131,51	4.279,34	55,63
6. Dana Desa	4.396,78	1.785,74	40,61
JUMLAH	39.846,75	19.613,88	49,22

1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatra Utara s.d 30 Juni 2022 sebesar Rp13.291,87 miliar didominasi oleh komponen Pajak Daerah sebesar Rp3.686,42 miliar dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp9.135,67 miliar.
2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatra Utara s.d 30 Juni 2022 sebesar Rp10.915,24 miliar didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp5.416,55 miliar.
3. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Sumatra Utara s.d 30 Juni 2022 sebesar Rp9.135,67 atau 68,73% dari total Realisasi APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sumatra Utara
4. Per 30 Juni 2022, alokasi dana TKDD sebesar Rp39,84 triliun telah realisasi sebesar Rp19,61 triliun (49,22%).
5. Dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi penurunan pagu TKDD sebesar Rp1,97 triliun dan terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp0,61 triliun.

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id dan aplikasi OM-SPAN



Kinerja APBD Regional Provinsi Sumatera Utara Periode s.d Juni 2022

No	Daerah	PAGU DAK Fisik	Realisasi
1	PROVINSI SUMATERA UTARA	330,88	16,98
2	KAB. ASAHAN	95,70	1,66
3	KAB. DAIRI	172,32	
4	KAB. DELI SERDANG	89,45	
5	KAB. KARO	92,10	
6	KAB. LABUHANBATU	51,32	
7	KAB. LANGKAT	81,44	0,27
8	KAB. MANDAILING NATAL	96,81	11,04
9	KAB. NIAS	117,58	4,73
10	KAB. SIMALUNGUN	207,96	
11	KAB. TAPANULI SELATAN	56,20	3,80
12	KAB. TAPANULI TENGAH	110,99	40,92
13	KAB. TAPANULI UTARA	69,16	9,49
14	KAB. TOBA	95,64	
15	KOTA BINJAI	40,42	4,14
16	KOTA MEDAN	34,67	
17	KOTA PEMATANG SIANTAR	50,10	
18	KOTA SIBOLGA	33,00	
19	KOTA TANJUNG BALAI	31,31	
20	KOTA TEBING TINGGI	50,03	
21	KOTA PADANGSIDIMPUAN	22,36	
22	KAB. PAKPAK BHARAT	66,29	0,84
23	KAB. NIAS SELATAN	125,39	20,53
24	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	131,13	11,98
25	KAB. SERDANG BEDAGAI	143,96	15,73
26	KAB. SAMOSIR	83,11	8,34
27	KAB. BATU BARA	67,51	11,13
28	KAB. PADANG LAWAS	57,73	8,95
29	KAB. PADANG LAWAS UTARA	69,99	
30	KAB. LABUHANBATU SELATAN	65,19	
31	KAB. LABUHANBATU UTARA	44,78	
32	KAB. NIAS UTARA	76,66	7,86
33	KAB. NIAS BARAT	154,99	2,47
34	KOTA GUNUNGSITOLI	43,08	7,10

(miliar rupiah)

REKOMENDASI:

- Mendorong Kepala Daerah untuk memberikan instruksi percepatan realisasi TKDD, khususnya penyaluran DAK Fisik, DID dan Dana Desa.
- Mendorong Pemda untuk meningkatkan koordinasi internal antar instansi yang terlibat dalam penyaluran TKDD.
- Menyediakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk mengelola penyaluran TKDD.
- Memperbanyak frekuensi Bimtek dan sosialisasi bagi operator keuangan Pemda terkait penyaluran TKDD
- Menginformasikan TKDD kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi.

Sumber : Aplikasi SIMTRADA





PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL



PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

1

Juni 2022



NILAI TUKAR
PETANI (NTP)

117,31
(Juni 2022)

NILAI TUKAR USAHA
PETANI (NTUP)

116,77
(Juni 2022)



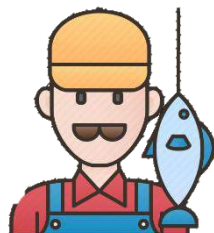
3

Juni 2022



NILAI TUKAR
NELAYAN

109,53
(Juni 2022)



5

Mei 2022



EKSPOR
40,99%

USD761,86 Juta



IMPOR
0,58%

USD531,62Juta

2

Triwulan I 2022



PERTUMBUHAN
PDRB

3,90%
(yoy)



4

Juni 2022

INFLASI

1,40%
(Juni)

5,61%
(yoy)

4,18%
(Jan-Juni 2022)



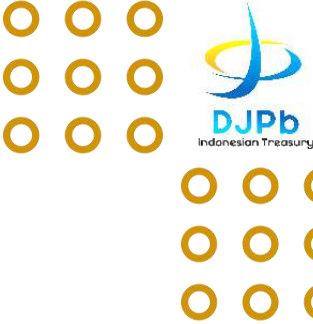
- Kota Gunung Sitoli inflasi 2,72%;
- Kota Medan inflasi 1,39%;

Rekomendasi:

Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota serta provinsi dalam menciptakan aglomerasi industri dalam rangka meningkatkan perekonomian Sumatera Utara

Sumber: BPS, BI, Disperindag, Diolah, 2022

Paparan ALCO Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Juni 2022



PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

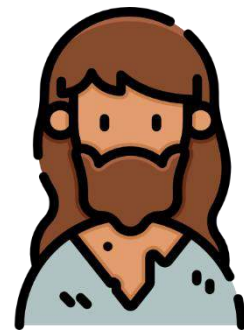
6
September 2021



LAJU
PERTUMBUHAN
PENDUDUK

1,23%

8
September 2021



PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN

8,49%

10
Februari 2022



TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA

5,47%

7
Desember 2021



INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA

72

9
September 2021



GINI RATIO

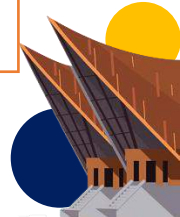
0,313

11
ANGKA
PARTISIPASI
SEKOLAH



- USIA 7-12: 99,32%
- USIA 13-15: 96,99%
- USIA 16-18: 78,66%
- USIA 19-24: 27,05%

Sumber: BPS, data diolah 2022





Current Issues & Strategic Issues di Regional Provinsi Sumatera Utara





Current Issues di Regional Sumatera Utara

1. Kebijakan perubahan tarif PPN 10% menjadi 11% akan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN sebesar Rp11,46 triliun. tetapi disisi lain, kenaikan PPN berpotensi terhadap naiknya inflasi, namun kenaikan tersebut dirasa tidak akan signifikan. Pengaruh perubahan tarif PPN tersebut baru dapat terlihat pada bulan mendatang.
2. Berbeda dengan perubahan tarif PPN 11%, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tentunya akan sangat berpengaruh pada tingkat inflasi Sumatera Utara karena kenaikan harga BBM memiliki efek domino yang lebih besar. Kenaikan BBM akan mempengaruhi harga-harga komoditas, dan juga akan berpengaruh kepada permintaan barang-barang komoditas unggulan yang rutin di ekspor, salah satunya adalah komoditas unggulan ekspor pertanian seperti minyak sawit, karet dan kopi. Efek domino tersebut akan berdampak pada tingkat inflasi nasional, karena pada tahun 2021 nilai ekspor komoditas pertanian di Sumut merupakan yang tertinggi di Indonesia.
3. Kenaikan harga pupuk dunia yang berpengaruh ke harga pupuk nasional, termasuk di Sumut telah mendorong kenaikan sejumlah harga keekonomian beberapa kebutuhan hidup. Ditambah lagi dengan kenaikan biaya hidup petani mengalami peningkatan. Salah satunya adalah meningkatnya harga komoditas berupa cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di Sumut.





Strategic Issues di Regional Sumatera Utara





Update Penanganan Covid di Regional Sumatera Utara s.d 30 Juni 2022

KASUS POSITIF KUMULATIF



53

KASUS
AKTIF



Turun **29,33%**
dibanding bulan
sebelumnya

Sumut : 155.172
Nasional : 6.088.460

TOTAL SEMBUH

151.860

Meningkat **124**
dibanding bulan
Mei 2022

VAKSINASI SUMUT



Dosis 1 : 11.002.974 (96,53%)
Dosis 2 : 9.409.081 (82,39%)
Dosis 3 : 2.828.949 (24,77%)

Sumber : <https://github.com> dan <https://covid19.sumutprov.go.id>





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

***PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL REGIONAL
SUMATERA UTARA***





PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SUMUT S.D 10 Juni 2022

Realisasi Program PEN di wilayah Sumut sebesar Rp3,47 T, dominan pada Kluster Perlindungan Masyarakat untuk memperkuat daya beli masyarakat rentan.

Rp887,70 M

Penanganan Kesehatan

- Klaim Pasien Rp724,38 M, kepada 1.998 Rumah Sakit dan 310.682 Pasien;
- insentif Nakes Rp163,31 M, kepada 36,258 Nakes

Rp2.471,11 M

Perlindungan Masyarakat

- PKH Rp763,30 M kepada 900.155 KPM; Sembako Rp809,47 kepada 2,50 Juta KPM
- BLT Minyak Goreng Rp228,25 M kepada 2,28 Juta KPM
- BLT Desa Rp670,09 M

Penguatan Pemulihan Ekonomi

Rp106,84 M

(15,33% dari Pagu)

- Padat Karya PUPR Rp122,10 M
- Pariwisata Rp30,80 M
- Ketahanan Pangan Rp75,91 M

Ditengah Risiko ketidakpastian global yang eskalatif:

- Peran APBN sebagai **shock absorber** perlu **dijaga agar berfungsi optimal**
- **Program PC-PEN harus responsive dan antisipatif**

Sumber : <https://github.com> dan <https://covid19.sumutprov.go.id>





Policy Response





Policy Response

No.	Permasalahan Fiskal	Dampak Negatif yang mungkin timbul	Rekomendasi
1.	Kenaikan PPH Badan, PPN dan PPN OP, serta perubahan peruran perpajakan yang berlaku tanggal 1 Juni 2022, seperti: - PMK- 42/PMK.010/2022 - PMK- 71/PMK.03/2022 - PMK- 70/PMK.03/2022 - PMK-65/PMK.03/2022 - Dll PMK lainnya	Ditengah pemulihan perekonomian akibat dampak Pandemi Covid-19, kenaikan tarif perpajakan dan kenaikan harga komoditas dapat memberatkan masyarakat dan berdampak pada dunia usaha serta konsumsi masyarakat.	• Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif serta assessment dampak kenaikan Tarif perpajakan tersebut terhadap tingkat konsumsi masyarakat.
2	Anggaran Belanja yang telah ditetapkan untuk TA. 2022 pada tahun 2021, dirancang dengan menggunakan PPN 10%. Dengan adanya kebijakan peningkatan tarif PPN 11% akan berpengaruh kepada DIPA masing-masing Satker.	Peningkatan tarif PPN 11% dapat membuat kekurangan anggaran belanja K/L sebagai efek dari kenaikan tarif PPN tersebut.	Perlu dilakukan revisi DIPA atau penambahan anggaran belanja K/L.

Sumber : northsumatrainvest.id





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



TERIMA KASIH

